

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indonesia hingga saat ini masih memiliki ketergantungan dengan kebijakan impor dalam berbagai sektor terutama pada komoditas pangan (beras). Pada proses pengambilan kebijakan luar negeri impor beras ini terdapat tiga pilar yang memiliki fokus terhadap komoditas pangan Indonesia yaitu BULOG, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, dan ketiga pilar ini memiliki pendapat berbeda terkait dengan pengambilan kebijakan impor beras Indonesia. Pertentangan yang terjadi antara ketiga pilar tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan dari masing-masing lembaga tersebut sesuai dengan peran dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Dalam proses pengambilan kebijakan impor beras ini ketiga pilar tersebut memiliki posisi dan daya tawar tertentu.

BULOG sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas pangan dalam negeri dan mengutamakan penyerapan produksi beras domestik menyebabkan BULOG melakukan penolakan terhadap kebijakan impor beras. Namun BULOG juga memiliki tanggung jawab sebagai lembaga fasilitator (operator) dari pelaksanaan kebijakan impor tersebut. Berdasarkan tanggung jawab ini BULOG tidak memiliki wewenang untuk tidak melaksanakan kebijakan impor beras tersebut.

Pilar selanjutnya dalam proses pengambilan kebijakan impor beras ini adalah Kementerian Pertanian yang memiliki peran dan fungsi menjaga kuantitas dan kualitas produksi beras dalam negeri. Terkait dengan kebijakan impor beras ini Kementerian Pertanian juga melakukan penolakan karena kebijakan tersebut mengganggu proses pendistribusian beras domestik oleh para petani. Pada proses pengambilan kebijakan impor

beras ini Kementerian Pertanian memiliki peran yang cukup besar, hal ini disebabkan oleh data proyeksi produksi beras Indonesia yang dihasilkan Kementerian Pertanian tersebut menjadi bahan pertimbangan dari Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan SPI pelaksanaan kebijakan impor beras. Namun seiring dengan BULOG, Kementerian Pertanian tidak memiliki kewenangan untuk melarang pelaksanaan kebijakan impor beras tersebut.

Pilar terakhir dari pengambilan kebijakan impor beras ini adalah Kementerian Perdagangan. Berdasarkan peran dan fungsi yang dimiliki, Kementerian ini mempunyai peran paling vital dalam terciptanya kebijakan luar negeri ini. Posisi Kementerian Perdagangan sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan stabilitas harga berbagai komoditas termasuk bahan pangan serta memiliki kewenangan dalam pengaturan kebijakan ekspor-impor di Indonesia, menjadikan Kementerian Perdagangan mempunyai peran paling besar dalam terciptanya kebijakan tersebut. Hal ini tertuang di dalam Permendag No.1/2018 yang menyatakan Kementerian Perdagangan memiliki peran sentral di dalam terbentuknya kebijakan impor beras Indonesia.

Menurut peneliti, berdasarkan hasil analisis diatas proses pengambilan kebijakan impor beras Indonesia memiliki tiga pilar yang di dalamnya dikuasai oleh Kementerian Perdagangan yang memiliki peran sentral sebagai pengambil keputusan berupa penerbitan (SPI) impor beras yang menjadi legal formal dari pelaksanaan kebijakan impor beras tersebut. Namun dua pilar lainnya juga memiliki peran yang cukup besar yaitu BULOG sebagai fasilitator impor beras, dan Kementerian Pertanian sebagai pemilik dari data proyeksi produksi beras nasional.

5.2 Saran

Pada penelitian proses pengambilan kebijakan impor beras Indonesia ini, masih terdapat berbagai kekurangan, namun peneliti melihat pertentangan yang terjadi antara

masing-masing aktor birokrat dalam proses kebijakan luar negeri impor beras ini disebabkan oleh tumpang tindih dari lembaga-lembaga tersebut. Permasalahan yang terjadi diantara ketiga lembaga tersebut disebabkan kepentingan yang dimiliki oleh BULOG, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan yang menyebabkan perbedaan sudut pandang dalam proses pengambilan kebijakan impor beras ini. Untuk itu peneliti menyarankan dalam terciptanya kebijakan luar negeri impor beras ini tiga pilar lembaga pemerintahan ini saling bersinergi dan memiliki keselarasan terutama terkait dengan Stok Beras Nasional (SBN) guna menyamakan sudut pandang dalam memutuskan dilaksanakan atau tidak kebijakan impor komoditas tersebut, sinergitas ini juga berhubungan dengan pemahaman tugas dan peran masing-masing lembaga oleh lembaga yang lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih dan munculnya pihak yang dirugikan dari pelaksanaan kebijakan impor komoditas beras tersebut.

